

**IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP
PERLINDUNGAN PEKERJA PLATFORM DIGITAL DALAM
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

***LEGAL AND POLICY IMPLICATIONS ON THE PROTECTION
OF DIGITAL PLATFORM WORKERS IN THE NATIONAL
SOCIAL SECURITY SYSTEM***

TESIS

Oleh

RIMA PATRICIA MARINTAN

2402198058



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP
PERLINDUNGAN PEKERJA PLATFORM DIGITAL DALAM
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

***LEGAL AND POLICY IMPLICATIONS ON THE PROTECTION
OF DIGITAL PLATFORM WORKERS IN THE NATIONAL
SOCIAL SECURITY SYSTEM***

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

RIMA PATRICIA MARINTAN

2402198058



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2026



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Patricia Marintan
Nim : 2402198058
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA PLATFORM DIGITAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL"

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Januari 2026



Rima Patricia Marintan
NIM: 2402198058



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

"IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP
PERLINDUNGAN PEKERJA PLATFORM DIGITAL DALAM
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL"

Oleh :

Nama : Rima Patricia Marintan
Nim : 2402198058
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 28 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NUPTK: 7252746647130100

Pembimbing II


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
NUPTK: 5759741642230062

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK: 6434757658137090



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 28 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama

Nama : Rima Patricia Marintan
Nim : 2402198058
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

**"IMPLIKASI HUKUM DAN KEBLIKIAN TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA PLATFORM DIGITAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL"**

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Paltada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rima Patricia Marintan
Nim : 2402198058
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Perlindungan
Pekerja Platform Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial
Nasional

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan sata mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 26 Januari 2026



Rima Patricia Marintan
NIM: 2402198058

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Penyusunan tesis ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat dan telah melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja baru melalui platform digital. Kehadiran pekerja platform digital membawa tantangan serius bagi sistem hukum ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial nasional yang selama ini dibangun berdasarkan paradigma hubungan kerja konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam status hukum pekerja platform digital serta implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan jaminan sosial bagi mereka, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pembaruan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan dari berbagai pihak terutama kepada dosen pembimbing yang benar-benar totalitas untuk terselesainya Tesis ini, pengormatan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak DR. Hulman Panjaitan, S.,H, M.,H, selaku Pembimbing I dan Ibu DR. Rr. Ani Wijayati, S.,H, M.,Hum selaku Pembimbing II, serta DR.Paltiada Saragi, S.H.,M.H selaku Penguji, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

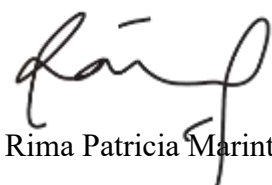
Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. DR. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. DR. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Tamu dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. DR. Rekson Silaban, selaku Ketua Tim Ahli Penyusunan Hukum Ketenagakerjaan DPD RI dan juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) teristimewa buat Adik Vandry dan Sakal Nababan yang luar biasa dalam hal pelayanan dan perhatiannya dalam masa-masa studi dan penyelesaian Tesis ini, kalian adalah luar biasa dengan konsep “Melayani Bukan Untuk Dilayani” terimakasih dan hormat.
8. M. Simanjuntak (Op. Kayla Doli), Bapak saya yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Peatric Nico Marulitua Simanjunta, S.H, adik saya yang selalu mendukung penulis dalam menempuh studi lanjut ini.
10. Terkhusus kepada Suami saya tercinta Mangiring Tua Simanullang, Anak-anakku Pangeran Jarico Phillip dan Putri Chaterine Anggelica Simanullang yang selalu mendoakan. Semoga semangat dan perjuangan MAMA ini menjadi contoh buat kalian untuk selalu menjadikan pendidikan adalah kunci utama menggapai cita-cita kalian.
11. Abang Sahala Lumbangaol, Ibu Inda D Hasman, , Abang Padot Gultom, Abang Sangap Surbakti, Kakak Desye Syul Lumbaa, Kakak Hotnida Simatupang, Ribka Laura, Mutiara Gultom, Peppy, Sandy Natalia, Reza Nggebu, Woro Wahyuningtyas, Natasha Siahaan, dan Sahabatku serta relasi-relasi yang selalu mensupport penulis guna penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap karya Tesis ini dapat menjadi bahan kajian untuk para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan serta masyarakat luas dalam pelaksanaan perlindungan konsumen mengenai pemberlakuan regulasi termasuk hak-hak dan kewajiban dari Pengusaha, Pemerintah dan Masyarakat.

Jakarta, 28 Januari 2026



Rima Patricia Marintan

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	-----	ii
Lembar Persetujuan	-----	iii
Lembar Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir	-----	iv
Lembar Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	-----	v
Kata Pengantar	-----	vi
Daftar Isi	-----	viii
Abstrak	-----	xi
Abstract	-----	xii
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	11
C.	Tujuan Penelitian	11
1.	Tujuan Penelitian	11
2.	Maksud Penelitian	12
D.	Kegunaan Penelitian	12
1.	Kegunaan Teoritis	12
2.	Kegunaan Praktis	15
E.	Kerangka Pemikiran	19
1.	Kerangka Teori	19
a.	Teori Perlindungan Hukum	22
b.	Teori Keadilan Distributif	24
2.	Kerangka Konsep	29
F.	Metode Penelitian	35
1.	Spesifikasi Penelitian	36
2.	Jenis Penelitian	36
3.	Pendekatan Penelitian	37
a.	Pendekatan Perundang-undangan	37
b.	Pendekatan Konseptual	38
4.	Sumber Data	38
5.	Teknik Pengumpulan Data	39
6.	Teknik Analisis Data	39

	7. Orisinalitas Penelitian -----	40
	G. Sistematika Penulisan -----	43
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA -----	48
	A. Kerangka Teoritis Penelitian -----	48
	1. Teori Perlindungan Hukum -----	50
	2. Teori Keadilan Distributif -----	55
	3. Konsep Jaminan Sosial Internasional -----	59
	B. Kajian Konseptual -----	63
	1. Konsep Implikasi Hukum -----	63
	2. Konsep Kebijakan Hukum -----	64
	3. Konsep Perlindungan Pekerja -----	65
	4. Konsep Pekerjaan Platform Digital -----	66
	5. Konsep Sistem Jaminan Sosial -----	67
BAB III	STATUS HUKUM PEKERJAAN PLATFORM DIGITAL DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA -----	68
	A. Dinamika Munculnya Pekerja Platform Digital Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia -----	68
	1. Transformasi Pola Kerja akibat Digitalisasi Ekonomi-----	68
	2. Karakteristik Pekerjaan Platform Digital-----	69
	3. Relevansi Teori Perlindungan Hukum -----	74
	4. Kewajiban Negara dalam Perspektif Konstitusional -	74
	5. Implikasi terhadap Sistem Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial -----	75
	B. Status Hukum Pekerja Platform Digital dalam Perpektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia -----	77
	1. Signifikasi Status Hukum dalam Sistem Perlindungan Ketenagakerjaan -----	77
	2. Konsep Hubungan Kerja dan Batasan Normatifnya--	78
	3. Perjanjian Kemitraan dan Asimetris Relasi Hukum --	79
	4. Subordinasi Digital sebagai Bentuk Baru Hubungan Kerja -----	80
	5. Ketergantungan Ekonomi dan Kerentanan Struktural -	80
	6. Konsekuensi Status Hukum terhadap Perlindungan	

	Ketenagakerjaan -----	81
	7. Kebutuhan Reformulasi Status Hukum Pekerja Platform Digital -----	82
	C. Status Oekerja Platform Digital dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional -----	83
	1. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Paradigma Hubungan Kerja Formal -----	83
	2. Implikasi Status Hukum terhadap Akses Jaminan Sosial -----	85
	D. Analisis Status Hukum Pekerja Platform Digital Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum -----	87
	E. Penegasan Analisis BAB III -----	91
BAB IV	IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA PLATFORM DIGITAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL -----	96
	A. Kerangka Umum Implikasi Hukum dan Kebijakan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional -----	96
	B. Tantangan Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Paltform Digital-----	100
	1. Ambiguitas Status Hukum sebagai Hambatan Normatif-----	100
	2. Ketidaksinkronan Regulasi Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial -----	103
	C. Tantangan Implikasi Kebijakan terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Platform Digital -----	105
	1. Rendahnya Kepesertaan sebagai Dampak Kebijakan Non Inklusif -----	105
	2. Beban Iuran dan Risiko yang Tidak Proposional -----	107
	D. Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Perspektif Teori Keadilan Distribusi -----	109
	E. Penegasan Analisis BAB IV -----	113
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan -----	119
	B. Saran -----	121
	DAFTAR PUSTAKA -----	123

ABSTRAK

Judul : Implikasi Hukum Dan Kebijakan Terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

Transformasi ekonomi digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru melalui platform digital yang menantang konstruksi hukum ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial konvensional. Pekerja platform digital bekerja dalam pola kerja yang fleksibel, berbasis algoritma, dan umumnya diklasifikasikan sebagai mitra usaha atau pekerja mandiri, bukan sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal. Klasifikasi tersebut menimbulkan ketidakpastian status hukum yang berdampak langsung pada terbatasnya akses pekerja platform digital terhadap perlindungan jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pekerja platform digital dalam sistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan jaminan sosial bagi pekerja platform digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan. Kerangka analisis penelitian didasarkan pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan distributif untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi pekerja platform digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas status hukum, ketidaksinkronan antara hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial, serta desain kebijakan kepesertaan yang belum inklusif menyebabkan rendahnya tingkat kepesertaan pekerja platform digital dalam program jaminan sosial dan pembebanan risiko sosial secara tidak proporsional kepada pekerja.

Kata Kunci: pekerja platform digital, jaminan sosial nasional, perlindungan hukum, keadilan distributif, ekonomi digital.

ABSTRACT

Title : Legal And Policy Implications On The Protection Of Digital Platform Workers In The National Social Security System

The transformation of the digital economy has generated new forms of work relationships through digital platforms that challenge the conventional legal framework of labour law and social security systems. Digital platform workers perform flexible, algorithm-based work and are generally classified as independent contractors or business partners rather than formal employees. This classification creates legal uncertainty regarding their employment status, which directly affects their access to social security protection within Indonesia's National Social Security System. This research aims to analyze the legal status of digital platform workers in the Indonesian labour and social security system and to examine the legal and policy implications for their social security protection.

This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and judicial decision approaches. The analytical framework is grounded in the theory of legal protection and the theory of distributive justice to assess whether existing regulations and policies provide adequate legal protection and social justice for digital platform workers.

The findings indicate that ambiguous legal status, regulatory inconsistencies between labour law and social security law, and non-inclusive participation policies have resulted in low social security coverage and the disproportionate allocation of social risks to digital platform workers.

Keywords: *digital platform workers, national social security system, legal protection, distributive justice, digital economy.*